

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah merupakan dokumen perencanaan rencana kerja tahunan yang berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa setiap pengelola pemerintahan diwajibkan menyusun Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya.

Sementara Untuk menjamin bahwa Renja telah menjabarkan Renstra SKPD dengan baik, maka perlu dilakukan Evaluasi. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dilakukan setiap Triwulan sesuai dengan aliran dana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun berjalan. Evaluasi Renja SKPD sangat diperlukan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan tahun berjalan. Hasil evaluasi selanjutnya dipakai sebagai bahan perbaikan program yang sedang berjalan dan dasar penyusunan Renja SKPD tahun berikutnya.

Dalam pemerintahan yang baik bukan semata-mata mengejar berapa uang yang diperoleh, untuk kegiatan pembangunan, tetapi sejauh mana lembaga dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang dibebankan kepadanya sehingga terwujud pemerintahan yang akuntabel. Akuntabilitas merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Terkait dengan hal tersebut, maka dalam pertanggungjawaban keuangan menitikberatkan pada konsep akuntabilitas pada program/kegiatan yang strategis serta tidak mengesampingkan pentingnya pertanggungjawaban keuangan pada program/kegiatan non strategis. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Dasar Hukum

Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Evaluasi Renja 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 -2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005 -2025;

- 
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016–2021;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 14. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan disusunnya Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut:

a. Maksud

Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2021 ini merupakan laporan realisasi pertanggungjawaban dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah kepada Bupati Soppeng maupun kepada pihak ekstern yang berkepentingan yang di dalamnya memberikan gambaran pertanggungjawaban program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2021.

b. Tujuan

Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 ini bertujuan untuk :

- a. Memberikan pertanggungjawaban secara transparan mengenai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan Visi dan Misi



Organisasi. Berdasarkan rencana strategi yang telah ditetapkan sebelumnya dengan mengacu kepada tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas sebagai suatu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya;

- b. Melaporkan kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun sebagai bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Soppeng;
- c. Melaporkan capaian kinerja yang telah dilaksanakan berdasarkan program dan kegiatan yang direncanakan Tahun Anggaran 2021.

D. Sistematika Laporan

Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Laporan

Bab II Rencana Kerja dan Pendanaan SKPD Tahun 2021

Bab III Perbandingan antara Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran dalam RENSTRA, RENJA dengan DPA TAHUN 2021

Bab IV Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021

Bab V Kendala yang Dihadapi dalam Pembangunan Tahun 2020

Bab VI Penutup

BAB II

RENCANA KERJA dan PENDANAAN SKPD TAHUN 2021

A. Program dan Kegiatan

Jumlah Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2021 sebanyak 4 (Empat) Program dengan 16 (Enam Belas) kegiatan dan 63 (Enam Puluh Tiga) sub kegiatan terdiri atas :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas Kegiatan dan sub Kegiatan:**
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan PenyPembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kotausunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - c. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**
 - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan/Material
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, yang terdiri atas Kegiatan dan sub Kegiatan, yang terdiri atas Kegiatan dan sub Kegiatan:

- a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**
- Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD

- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
- Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

- Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
- Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
- Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
- Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
- Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

- Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
- Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
- Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran

- Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
- Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
- Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota

d. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
- Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
- Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang terdiri atas Kegiatan dan sub Kegiatan:

a. Pengelolaan Barang Milik Daerah

- Penyusunan Standar Harga
- Pengamanan Barang Milik Daerah
- Penilaian Barang Milik Daerah
- Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, yang terdiri atas Kegiatan dan sub Kegiatan:

a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

- Perencanaan pengelolaan pajak daerah

- 
- Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
 - Penagihan Pajak Daerah
 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

BAB III

PERBANDINGAN ANTARA PROGRAM, KEGIATAN dan ANGGARAN dalam RENSTRA, RENJA dengan DPA TAHUN 2021

Bab ini menyajikan persandingan antara program/kegiatan dalam Rencana Kerja dan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng. Hal ini bertujuan untuk memperoleh informasi konsistensi pelaksanaan Rencana Strategis ke perencanaan tahunan berupa Rencana Kerja.

Berdasarkan hasil pengolahan data dan informasi pada format evaluasi hasil Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Triwulan II, diketahui bahwa :

1. Sebanyak 4 Program (100 %) di Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 sesuai dengan kegiatan di Rencana Strategis Tahun 2021, meski ada penyesuaian nama program. Penyesuaian nama program diantaranya karena ada perubahan aturan yang standar untuk penamaan program.
2. Tidak terdapat penyederhanaan kegiatan dari renstra ke Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021. Semua Kegiatan di renstra terakomodir pada DPA Tahun 2021. Hal ini disesuaikan dengan kebijakan penyusunan anggaran tahun 2021, dan skala prioritas. Lebih rinci disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Persandingan Antara Program/Kegiatan
Dalam Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021

RENCANA STRATEGIS				RENCANA KERJA				DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN					
N o.	Program	Kegiatan	Indikator	N o.	Program	Kegiatan	Indikator	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
I.	Program Pelayanan Perkantoran		% Penyelesaian Kegiatan Tepat Waktu	I.	Program Pelayanan Perkantoran		% Penyelesaian Kegiatan Tepat Waktu	I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				28,120,309,264
										Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50,130,000
											Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun (dokumen)	7,795,000
											Koordinasi dan	Jumlah dokumen	14,705,000

RENCANA STRATEGIS				RENCANA KERJA				DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN					
N o.	Program	Kegiatan	Indikator	N o.	Program	Kegiatan	Indikator	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
											Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA yang disusun (dok)	
											Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan yang disusun(dok)	15,830,000
											Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun (jenis dokumen)	11,800,000
										Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Keterpenuhi an Administrasi Keuangan	19,731,048,764
											Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	19,599,245,764

RENCANA STRATEGIS				RENCANA KERJA				DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN					
N o.	Program	Kegiatan	Indikator	N o.	Program	Kegiatan	Indikator	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
												ya	
											Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah SPM yang diverifikasi (SPM)	118,340,000
											Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan yang disusun (Dokumen)	13,463,000
										Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah jenis retribusi yang dikelola	2,054,353
											Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah objek retribusi (objek retribusi)	2,054,353
										Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah ASN yang terlayani Administrasi	39,200,000

RENCANA STRATEGIS				RENCANA KERJA				DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN					
N o.	Program	Kegiatan	Indikator	N o.	Program	Kegiatan	Indikator	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
												Kepegawaiaannya	
											Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian (dok)	39,200,000
		- Penyediaan Bahan Bacaan dan - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya - Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Jumlah pengisian tabung gas - Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah yang dilaksanakan - Jumlah Paket Pelayanan Administrasi Perkantoran			- Penyediaan Bahan Bacaan dan - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya - Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Jumlah pengisian tabung gas - Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah yang dilaksanakan - Jumlah Paket Pelayanan Administrasi Perkantoran			Administrasi Umum Perangkat Daerah		jumlah keterpenuhan administrasi umum (paket)	829,723,970
											Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pe	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan	15,523,500

RENCANA STRATEGIS				RENCANA KERJA				DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN					
N o.	Program	Kegiatan	Indikator	N o.	Program	Kegiatan	Indikator	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
											nerangan Bangunan Kantor	(jenis)	
											Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor (paket)	143,565,000
											Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (lembar)	312,862,500
											Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah jenis bahan/ material yang disediakan	168,699,370
											Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yg difasilitasi (orang)	20,425,000
											Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kali)	168,648,600
										Pengadaan Barang Milik Daerah		Jumlah barang milik daerah	270,100,000

RENCANA STRATEGIS				RENCANA KERJA				DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN					
N o.	Program	Kegiatan	Indikator	N o.	Program	Kegiatan	Indikator	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
										Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		yang diadakan (unit)	
											Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (unit)	270,100,000
		- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah Pembayaran Kebutuhan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik - Jumlah Jenis Alat Listrik dan Penerangan Gedung Kantor - Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga			- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah Pembayaran Kebutuhan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik - Jumlah Jenis Alat Listrik dan Penerangan Gedung Kantor - Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah paket jasa penunjang pemerintahan daerah yang disediakan (paket)	7,041,847,027
											Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah Paket Pengiriman	10,000,000
											Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran jasa telepon, air, dan listrik (kali)	6,512,047,027
											Penyediaan	Jumlah jasa	519,800,0

RENCANA STRATEGIS				RENCANA KERJA				DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN					
N o.	Program	Kegiatan	Indikator	N o.	Program	Kegiatan	Indikator	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
											n Jasa Pelayanan Umum Kantor	pelayanan umum yang disediakan (jenis)	00
		- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	- Jumlah STNK Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4 - Jumlah Petugas Kebersihan dan Peralatan Kebersihan			- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	- Jumlah STNK Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4 - Jumlah Petugas Kebersihan dan Peralatan Kebersihan			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang milik daerah yang dipelihara (unit)	156,205,150
											Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yg dipelihara dan dibayarkan STNK (unit)	117,209,150
											Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	19,050,000

RENCANA STRATEGIS				RENCANA KERJA				DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN					
N o.	Program	Kegiatan	Indikator	N o.	Program	Kegiatan	Indikator	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
											Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara (meter persegi) / Jumlah unit gedung yang di rehab (unit)	19,946,000
II.	- Program Perencanaan Pembangunan Daerah - Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		- % ketersediaan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD yang sesuai dengan regulasi - % Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan daerah tempat	II.	- Program Perencanaan Pembangunan Daerah - Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		- % ketersediaan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD yang sesuai dengan regulasi - % Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan daerah tempat	II.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			% Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan daerah tepat waktu	120,599,669,409
		- Penyusunan KUA-PPAS - Asistensi Penyusunan RAPBD - Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD - Penyusunan Rancangan	- Jumlah dokumen KUA-PPAs, Pokok dan Perubahan - Jumlah SKPD yang diaseistensi - Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD - Jumlah Rancangan		- Penyusunan KUA-PPAS - Asistensi Penyusunan RAPBD - Penyusunan Rancangan	- Jumlah dokumen KUA-PPAs, Pokok dan Perubahan - Jumlah SKPD yang diaseistensi - Jumlah Rancangan			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			Jumlah dokumen rencana anggaran daerah yang disusun sesuai regulasi	1,063,670,000

RENCANA STRATEGIS				RENCANA KERJA				DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN					
N o.	Program	Kegiatan	Indikator	N o.	Program	Kegiatan	Indikator	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
		Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD - Sosialisasi tentang APBD Pokok dan Perubahan (1) - Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD - Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD - Sosialisasi tentang APBD Pokok dan Perubahan (2) - Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (1) - Penyusunan Standar Biaya Umum	Perbub Tentang APBD - Jumlah Peserta Sosialisasi - Jumlah Rancangan PERDA tentang perubahan APBD - Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD - Jumlah peserta sosialisasi - Jumlah Peraturan Perundang-undangan - Jumlah Standar Biaya Umum (Buku)			Peraturan Daerah tentang APBD - Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD - Sosialisasi tentang APBD Pokok dan Perubahan (1) - Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD - Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD - Sosialisasi tentang APBD Pokok dan Perubahan (2) - Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (1) - Penyusunan Standar Biaya Umum	Peraturan Daerah Tentang APBD - Jumlah Rancangan Perbub Tentang APBD - Jumlah Peserta Sosialisasi - Jumlah Rancangan PERDA tentang perubahan perubahan APBD - Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD - Jumlah peserta sosialisasi - Jumlah Peraturan Perundang-undangan - Jumlah Standar Biaya Umum (Buku)						

RENCANA STRATEGIS				RENCANA KERJA				DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN					
N o.	Program	Kegiatan	Indikator	N o.	Program	Kegiatan	Indikator	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
											Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA-PPAS Pokok	10,550,000
											Koordinasi dan Penyusunan perubahan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA-PPAS Perubahan	11,115,000
											Koordinasi , Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah SKPD yang di asistensi	29,225,000
											Koordinasi , Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah SKPD yang di asistensi	18,725,000
											Koordinasi , Penyusunan dan Verifikasi	Jumlah SKPD yang di asistensi	3,875,000

RENCANA STRATEGIS				RENCANA KERJA				DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN					
N o.	Program	Kegiatan	Indikator	N o.	Program	Kegiatan	Indikator	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
											DPA-SKPD		
											Koordinasi , Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah SKPD yang di asistensi	5,255,000
											Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Perbup Tentang APBD Jumlah peserta Sosialisasi	502,375,000
											Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Perbup Tentang penjabaran Perubahan APBD Jumlah	474,000,000

RENCANA STRATEGIS				RENCANA KERJA				DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN					
N o.	Program	Kegiatan	Indikator	N o.	Program	Kegiatan	Indikator	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
											Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	peserta Sosialisasi	
											Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Peraturan Perundang-Undangan & Jumlah Standar Biaya Umum	8,550,000
		- Peningkatan Manajemen Pengelolaan Kas Daerah - Sinkronisasi dan Rekonsiliasi Pengelolaan Dana dengan Instansi Terkait - Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan - Pengelolaan Gaji dan Tunjangan PNSD	- Jumlah Dokumen Kas Daerah - Jumlah SKPD Pengelola Dana DAK - Persentase Penyelesaian Verifikasi SP2D Tepat Waktu - Persentase Pembayaran Gaji Tepat Waktu dan Tepat Jumlah			- Peningkatan Manajemen Pengelolaan Kas Daerah - Sinkronisasi dan Rekonsiliasi Pengelolaan Dana dengan Instansi Terkait - Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan - Pengelolaan Gaji dan Tunjangan PNSD	- Jumlah Dokumen Kas Daerah - Jumlah SKPD Pengelola Dana DAK - Persentase Penyelesaian Verifikasi SP2D Tepat Waktu - Persentase Pembayaran Gaji Tepat Waktu dan Tepat Jumlah			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah	121,254,500

RENCANA STRATEGIS				RENCANA KERJA				DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN					
N o.	Program	Kegiatan	Indikator	N o.	Program	Kegiatan	Indikator	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
											Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Kas Daerah	15,033,000
											Penyiapan , Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Anggaran Kas dan SPD	16,860,000
											Koordinasi , Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana	Jumlah SKPD Pengelola Dana DAK	10,650,000
											Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerima	Jumlah Laporan	23,290,000

RENCANA STRATEGIS				RENCANA KERJA				DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN					
N o.	Program	Kegiatan	Indikator	N o.	Program	Kegiatan	Indikator	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
											an dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
											Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Berita Acara atas pelaksanaan Rekonsiliasi	23,255,000
											Pembinaa	Persentase	32,166,50

RENCANA STRATEGIS				RENCANA KERJA				DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN					
N o.	Program	Kegiatan	Indikator	N o.	Program	Kegiatan	Indikator	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
											n Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Penyelesaia n Verifikasi SP2D Tepat Waktu	0
		- Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah - Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kabupaten - Penyusunan Rancangan PERDA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (1) - Penyusunan Rancangan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (2) - Penyusunan Rancangan PERDA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (2) - Penyusunan Rancangan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (2) - Peningkatan Manajemen	- Jumlah Laporan Keuangan Yang Akuntabel - Jumlah Laporan Keuangna Pemerintah Daerah - Jumlah Rancangan PERDA Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD - Jumlah Rancangan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (1) - Jumlah Rancangan PERDA tentang Petanggungjawaban Pelaksanaan APBD - Jumlah Rancangan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD - Jumlah Pelaksanaan			- Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah - Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kabupaten - Penyusunan Rancangan PERDA tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD (1) - Penyusunan Rancangan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD (2) - Penyusunan Rancangan PERDA tentang Pertanggungjawab	- Jumlah Laporan Keuangan Yang Akuntabel - Jumlah Laporan Keuangna Pemerintah Daerah - Jumlah Rancangan PERDA Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD - Jumlah Rancangan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD (1) - Jumlah Rancangan PERDA tentang Petanggungjawa ban Pelaksanaan APBD			Koordinasi dan Pelaksanaa n Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dok Pelaksanaa n Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang disusun	292,650,000	

RENCANA STRATEGIS				RENCANA KERJA				DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN					
N o.	Program	Kegiatan	Indikator	N o.	Program	Kegiatan	Indikator	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
		Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah - Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Kabupaten - Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (3) - Pembinaan dan Peningkatan Pengelolaan Keuangan Desa	Sidang Majelis - Jumlah Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Kabupaten - Jumlah Rancangan Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - Jumlah Desa yang Dibina Pengelolaan Keuangannya			an Pelaksanaan APBD (2) - Penyusunan Rancangan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (2) - Peningkatan Manajemen Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah - Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Kabupaten - Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (3) - Pembinaan dan Peningkatan Pengelolaan Keuangan Desa	- Jumlah Rancangan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD - Jumlah Pelaksanaan Sidang Majelis - Jumlah Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Kabupaten - Jumlah Rancangan Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - Jumlah Desa yang Dibina Pengelolaan Keuangannya						
											Koordinasi Pelaksanaan	Jumlah Laporan Keuangan	18,400,000

RENCANA STRATEGIS				RENCANA KERJA				DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN					
N o.	Program	Kegiatan	Indikator	N o.	Program	Kegiatan	Indikator	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
											Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Yang Akuntabel	
											Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Laporan Keuangan Yang Akuntabel	38,925,000
											Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semester	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	19,075,000

RENCANA STRATEGIS				RENCANA KERJA				DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN					
N o.	Program	Kegiatan	Indikator	N o.	Program	Kegiatan	Indikator	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
											n		
											Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD BLUD dan LKPD yang terkonsolidasi UN AUDIT	113,350,000
											Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Jumlah Rancangan PERDA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Jumlah Rancangan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	27,480,000

RENCANA STRATEGIS				RENCANA KERJA				DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN					
N o.	Program	Kegiatan	Indikator	N o.	Program	Kegiatan	Indikator	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
											Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		
											Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah pelaksanaan sidang Majelis	43,800,000
											Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan	Jumlah Rancangan Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	17,680,000
											Pembinaan Akuntansi, Pelaporan	Jumlah Desa yang dibina Pengelolaan Keuangannya	13,940,000



RENCANA STRATEGIS				RENCANA KERJA				DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN					
N o.	Program	Kegiatan	Indikator	N o.	Program	Kegiatan	Indikator	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
											dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	a	
										Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Jumlah Paket penunjang Urusan yang dilaksanakan	119,122,094,909
											Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Paket Alokasi Dana Penyaluran Bantuan Keuangan	0
											Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Persentase Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	0

RENCANA STRATEGIS				RENCANA KERJA				DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN					
N o.	Program	Kegiatan	Indikator	N o.	Program	Kegiatan	Indikator	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
											Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Paket Alokasi Dana Penyaluran Bantuan Keuangan	114,425,973,500
											Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Paket Alokasi Dana Darurat dan Mendesak	2,113,580,939
											Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Alokasi Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	2,582,540,470
III.	- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah - Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan		- % Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah Tepat Waktu - Persentase Luas Lahan Bersertifikat	III.	- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah - Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan,		- % Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah Tepat Waktu - Persentase Luas Lahan Bersertifikat	III.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			% Jumlah SKPD dengan Pencatatan Aset yang benar	900,435,000

RENCANA STRATEGIS				RENCANA KERJA				DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN					
N o.	Program	Kegiatan	Indikator	N o.	Program	Kegiatan	Indikator	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
	Tanah - Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah		% Jumlah SKPD dengan Pencatatan Aset yang benar		Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah - Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah		% Jumlah SKPD dengan Pencatatan Aset yang benar						
		- Penyusunan Standar Satuan Harga - Pengadaan Tanah Pemakaman Umum, Taman dan Tempat Pengelolaan Sampah - Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah - Pengamanan Aset-Aset Pemerintah Daerah - Penilaian Aset Daerah - Penjualan dan Penghapusan	Jumlah Buku Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Luas Tanah Pemakaman Umum, taman dan pengelolaan sampah (bidang) Jumlah peserta sosialisasi penyuluhan hukum pertanahan (Kecamatan) Jumlah Aset Pemda dan Jumlah Titik Penjagaan Jumlah Dokumen Penilaian Aset Daerah Jumlah Dokumen			- Penyusunan Standar Satuan Harga - Pengadaan Tanah Pemakaman Umum, Taman dan Tempat Pengelolaan Sampah - Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah - Pengamanan Aset-Aset Pemerintah	Jumlah Buku Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Luas Tanah Pemakaman Umum, taman dan pengelolaan sampah (bidang) Jumlah peserta sosialisasi penyuluhan hukum pertanahan (Kecamatan) Jumlah Aset Pemda dan			Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah SKPD dengan Pencatatan Aset yang benar	900,435,000

RENCANA STRATEGIS				RENCANA KERJA				DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN					
N o.	Program	Kegiatan	Indikator	N o.	Program	Kegiatan	Indikator	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
		Barnag Milik Daerah (1) - Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah - Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penjualan dan Penghapusan BMD Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah Jumlah SKPD yang dibina dan diawasi dalam pengelolaan BMD			Daerah - Penilaian Aset Daerah - Penjualan dan Penghapusan Barnag Milik Daerah (1) - Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah - Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Titik Penjagaan Jumlah Dokumen Penilaian Aset Daerah Jumlah Dokumen Penjualan dan Penghapusan BMD Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah Jumlah SKPD yang dibina dan diawasi dalam pengelolaan BMD						
											Penyusunan Standar Harga	Jumlah Buku Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa	56,650,000
											Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Aset Pemda dan Jumlah Titik Penjagaan	436,020,000
											Penilaian Barang Milik	Jumlah Dokumen Penilaian	34,800,000

RENCANA STRATEGIS				RENCANA KERJA				DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN					
N o.	Program	Kegiatan	Indikator	N o.	Program	Kegiatan	Indikator	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
											Daerah	Aset Daerah	
											Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah.	70,115,000
											Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dolumen Barang Milik Daerah	302,850,000
IV.	- Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) - Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan		- % Peningkatan PAD% Peningkatan PAD - % Penetapan Dokumen Pengelollan Keuangan Daerah Tepat Waktu	IV.	- Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) - Program Peningkatan dan		- % Peningkatan PAD% Peningkatan PAD - % Penetapan Dokumen Pengelollan	IV.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			% Peningkatan PAD	908,357,523

RENCANA STRATEGIS				RENCANA KERJA				DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN					
N o.	Program	Kegiatan	Indikator	N o.	Program	Kegiatan	Indikator	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
	Keuangan Daerah				Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Keuangan Daerah Tepat Waktu						
		- Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Daerah - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah - Pembentukan dan Pemutakhiran Basis Data Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah - Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	- Persentase capaian target retribusi daerah - Persentase capaian target pajak daerah - Jumlah Dokumen Pemutakhiran basis data bangunan objek pajak dan retribusi - Jumlah Peraturan Perundang-undangan			- Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Daerah - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah - Pembentukan dan Pemutakhiran Basis Data Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah - Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	- Persentase capaian target retribusi daerah - Persentase capaian target pajak daerah - Jumlah Dokumen Pemutakhiran basis data bangunan objek pajak dan retribusi - Jumlah Peraturan Perundang-undangan			Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		Persentase capaian target pajak dan retribusi daerah	
											Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah peraturan Perundang-Undangan	278,482,523
											Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah,	Jumlah Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi	69,875,000

RENCANA STRATEGIS				RENCANA KERJA				DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN					
N o.	Program	Kegiatan	Indikator	N o.	Program	Kegiatan	Indikator	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
											serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		
											Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah yang digunakan dengan Baik	0
											Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah dokumen pemutakhiran basis data bangunan objek pajak dan retribusi	369,450,000
											Penagihan Pajak Daerah	Persentase Jumlah SPPT yang terdistribusi	179,050,000
											Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pungutan Pajak dan	6,850,000



RENCANA STRATEGIS				RENCANA KERJA				DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN					
N o.	Program	Kegiatan	Indikator	N o.	Program	Kegiatan	Indikator	No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran
											Daerah	Retribusi Daerah	
											Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase capaian target retribusi daerah	4,650,000



BAB IV
CAPAIAN KINERJA dan ANGGARAN TAHUN 2021

A. ANGGARAN

Untuk menunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya pada tahun anggaran 2021, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng mendapatkan anggaran yang berasal dari APBD-P. Pagu anggaran tersedia yang berasal dari APBD-P Kabupaten Soppeng untuk Tahun 2021 adalah Rp.150.720.971.196,- . Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Operasi = Rp. 31.028.776.287,-
- b. Belanja Modal = Rp. 570.100.000.-
- c. Belanja Tidak Terduga = Rp. 2.113.580.939,-
- d. Belanja Transfer = Rp. 117.008.513.970,-

B. REALISASI BELANJA

Rencana dan Realisasi Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2021, dapat di lihat pada Tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1.
RENCANA DAN REALISASI BELANJA BERDASARKAN DPA
TAHUN 2021

No.	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	Belanja Operasi	31.028.776.287.00	5.263.166.412.00	16,96%
2	Belanja Modal	570.100.000.00	268.774.000.00	47,15%
3	Belanja Tidak Terduga	2.113.580.939.00	0	0%
4	Belanja Transfer	117.008.513.970.00	13.834.679.467.00	11,82%

C. REALISASI BERDASARKAN PROGRAM dan KEGIATAN

Capaian kinerja dan realisasi anggaran berdasarkan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.2. dan Tabel 3.3. berikut ini :

Tabel 3.2.
Capaian Kinerja dan Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun 2021

No.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN			KINERJA		
		Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.795.000.00	3.544.300.00	45.47%	50.00%	60.00%	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	14.705.000.00	3.045.000.00	20.71%	50.00%	40.00%	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15.830.000.00	3.388.800.00	21.41%	50.00%	50.00%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.800.000.00	5.299.350.00	44.91%	50.00%	60.00%	
-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.599.245.764.00	5.215.075.540.00	26.61%	50.00%	50.00%	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	118.340.000.00	29.910.000.00	25.27%	50.00%	50.00%	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	13.463.000.00	6.858.700.00	50.94%	50.00%	50.00%	
-	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						
	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	2.054.353.00	0.00	0.00%	50.00%	30.00%	
-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	39.200.000.00	12.699.950.00	32.40%	50.00%	50.00%	
-	Administrasi Umum Perangkat Daerah						
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.523.500.00	5.198.000.00	33.48%	50.00%	50.00%	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	143.565.000.00	68.280.000.00	47.56%	50.00%	50.00%	

No.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN			KINERJA		
		Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	324,982,500.00	757,500.00	0.23%	50.25%	50.00%	
	Penyediaan Bahan/ Material	248,699,370.00	5,000,000.00	2.01%	62.21%	50.00%	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20,425,000.00	10,150,000.00	49.69%	50.00%	80.00%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	168,648,600.00	82,969,400.00	49.20%	50.00%	100.00%	
-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	270,100,000.00	268,774,000.00	99.51%	50.00%	100.00%	
-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,000,000.00	909,000.00	9.09%	50.00%	50.00%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6,512,047,027.00	2,204,528,456.00	33.85%	50.00%	50.00%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	519,800,000.00	259,900,000.00	50.00%	50.00%	60.00%	
-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	117,209,150.00	43,558,475.00	37.16%	50.00%	50.00%	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19,050,000.00	3,425,000.00	17.98%	50.00%	50.00%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19,946,000.00	9,149,000.00	45.87%	50.00%	90.00%	
II.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						
-	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	10,550,000.00	1,984,400.00	18.81%	50.00%	0.00%	
	Koordinasi dan Penyusunan perubahan KUA dan PPAS	11,115,000.00	0.00	0.00%	50.00%	0.00%	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	29,225,000.00	0.00	0.00%	50.00%	0.00%	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	18,725,000.00	0.00	0.00%	50.00%	25.00%	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	3,875,000.00	0.00	0.00%	50.00%	50.00%	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	5,255,000.00	0.00	0.00%	50.00%	50.00%	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	502,375,000.00	265,084,400.00	52.77%	50.00%	50.00%	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	474,000,000.00	16,920,900.00	3.57%	50.00%	40.00%	

No.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN			KINERJA		
		Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Perubahan APBD						
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	8.550.000.00	0.00	0.00%	50.00%	40.00%	
-	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	15.033.000.00	2.599.850.00	17.29%	50.00%	50.00%	
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	16.860.000.00	3.679.950.00	21.83%	50.00%	50.00%	
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	10.650.000.00	2.400.000.00	22.54%	50.00%	50.00%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	23.290.000.00	4.800.000.00	20.61%	50.00%	50.00%	
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	23.255.000.00	4.600.000.00	19.78%	50.00%	50.00%	
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	32.166.500.00	8.920.000.00	27.73%	50.00%	50.00%	
-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	18.400.000.00	7.748.700.00	42.11%	50.00%	50.00%	
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LD dan Beban	38.925.000.00	11.624.800.00	29.86%	50.00%	50.00%	
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	19.075.000.00	2.099.850.00	11.01%	50.00%	50.00%	
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	113.350.000.00	41.894.050.00	36.96%	50.00%	65.00%	
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	27.480.000.00	1.050.000.00	3.82%	50.00%	80.00%	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan	43.800.000.00	0.00	0.00%	50.00%	0.00%	

No.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN			KINERJA		
		Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kerugian Daerah						
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan	17,680,000.00	0.00	0.00%	50.00%	0.00%	
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	13,940,000.00	0.00	0.00%	50.00%	0.00%	
-	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	114,425,973,500.00	16,518,819,467.00	14.44%	50.00%	50.00%	
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	114,425,973,500.00	0.00	0.00%	50.00%	0.00%	
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	114,425,973,500.00	0.00	0.00%	50.00%	0.00%	
III.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						
-	Pengelolaan Barang Milik Daerah						
	Penyusunan Standar Harga	56,650,000.00	1,400,000.00	2.47%	50.00%	50.00%	
	Pengamanan Barang Milik Daerah	436,020,000.00	37,428,600.00	8.58%	50.00%	60.00%	
	Penilaian Barang Milik Daerah	34,800,000.00	1,265,300.00	3.64%	50.00%	45.00%	
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	70,115,000.00	0.00	0.00%	50.00%	30.00%	
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	302,850,000.00	23,539,300.00	7.77%	50.00%	50.00%	
IV.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						
-	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah						
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	278,482,523.00	106,000,819.00	38.06%	50.00%	50.00%	
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	69,875,000.00	23,824,400.00	34.10%	50.00%	50.00%	
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	369,450,000.00	321,262,200.00	86.96%	50.00%	85.00%	
	Penagihan Pajak Daerah	279,130,000.00	0.00	0.00%	66.22%	60.00%	
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	6,850,000.00	0.00	0.00%	50.00%	0.00%	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4,650,000.00	750,000.00	16.13%	50.00%	40.00%	

Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021

TRIWULAN II

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Semua Bidang																							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-			28,212,429,264										8,242,420,471		29.22%					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah (%)					23	50,130,000	3		7						10	15,277,450	43.48%	30.48%				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja perangkat daerah yang disusun (dokumen)					10	7,795,000	2	-	2	3,544,300					4	3,544,300	40.00%	45.47%				
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun (Dokumen)					1	14,705,000	-	-	-	3,045,000					-	3,045,000	0.00%	20.71%				
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun (Dokumen)					1	15,830,000	-	-	-	3,388,800					-	3,388,800	0.00%	21.41%				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang disusun (Dokumen)					9	11,800,000	2	2,450,000	2	2,849,350					4	5,299,350	44.44%	44.91%				
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)					3	19,731,048,764	3		3						2	5,251,844,240	50.00%	26.62%				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Asn yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan (ASN)					107	19,599,245,764	107	1,939,941,028	107	3,275,134,512					107	5,215,075,540	100.00%	26.61%				

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang diverifikasi (SPM)					1200	118,340,000	60	-	230	29,910,000					290	29,910,000	24.17%	25.27%				
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD yang disusun (Dokumen)					3	13,463,000	-	-	1	6,858,700					1	6,858,700	33.33%	50.94%				
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah yang terlaksana dengan baik (%)					1	2,054,353	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%				
	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Objek Retribusi (objek retribusi) (Jenis)					2	2,054,353	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%				
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terlayani administrasi kepegawaiannya (ASN)					107	39,200,000	107		107						54	12,699,950	50.00%	32.40%				
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian (Dokumen)					7	39,200,000	2	-	2	12,699,950					4	12,699,950	57.14%	32.40%				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah keterpenuhan administrasi umum (Paket)					6	921,843,970	6		6						3	172,354,900	50.00%	18.70%				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis alat listrik/penerangan bangunan (Jenis)					2	15,523,500	2	-	2	5,198,000					1	5,198,000	50.00%	33.48%				
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor (Paket)					3	143,565,000	3	-	3	68,280,000					2	68,280,000	50.00%	47.56%				
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Lembar)					5200	324,982,500	1,000	378,750	1,700	378,750					2,700	757,500	51.92%	0.23%				
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan (Jenis)					3	248,699,370	3	2,500,000	3	2,500,000					2	5,000,000	50.00%	2.01%				
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (orang)					600	20,425,000	200	-	370	10,150,000					570	10,150,000	95.00%	49.69%				
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi serta kedinasan lainnya (kali)					280	168,648,600	90	-	190	82,969,400					280	82,969,400	100.00%	49.20%				

	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase perbendaharaan daerah yang terkoordinasi dan terkelola (%)					100	121,254,500	100		100						50	26,999,800	50.00%	22.27%				
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Kas Daerah (Dokumen)					4	15,033,000	4	-	4	2,599,850					2	2,599,850	50.00%	17.29%				
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)					2	16,860,000	2	-	2	3,679,950					1	3,679,950	50.00%	21.83%				
	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah SKPD Pengelola Dana DAK (SKPD)					9	10,650,000	9	-	9	2,400,000					5	2,400,000	50.00%	22.54%				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan (Dokumen)					6	23,290,000	6	-	6	4,800,000					3	4,800,000	50.00%	20.61%				
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Berita Acara atas Pelaksanaan Rekonsiliasi (Berita Acara)					6	23,255,000	6	-	6	4,600,000					3	4,600,000	50.00%	19.78%				
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Verifikasi SP2D Tepat Waktu (%)					100	32,166,500	100	-	100	8,920,000					50	8,920,000	50.00%	27.73%				
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang terkoordinasi dan terlaksana (%)					100	292,650,000	100		100						50	64,417,400	50.00%	22.01%				
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang Akuntabel (Laporan)					2	18,400,000	1	-	-	7,748,700					1	7,748,700	50.00%	42.11%				

	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Laporan Keuangan Semester dan Prognosis Kabupaten (Laporan)					2	38,925,000	-	-	1	11,624,800					1	11,624,800	50.00%	29.86%				
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)					1	19,075,000	1	-	-	2,099,850					1	2,099,850	100.00%	11.01%				
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD BLUD dan LKPD yang tekonsolidasi UN AUDIT (Dokumen)					1	113,350,000	1	-	-	41,894,050					1	41,894,050	100.00%	36.96%				
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan PERDA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Laporan)					1	27,480,000	-	-	-	1,050,000					-	1,050,000	0.00%	3.82%				
		Jumlah Rancangan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Laporan)					1		-	-	-						-		0.00%					
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Pelaksanaan Sidang Majelis (kali sidang)					4	43,800,000	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%				
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PERPU)					1	17,680,000	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%				
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang Dibina Pengelolaan Keuangan Daerah (Desa)					49	13,940,000	-	-	-	-					-	-	0.00%	0.00%				

	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Belanja Keuangan Daerah yang berdasarkan kewenangan (%)					100	119,122,094,909	50		50					25	16,518,819,467	25.00%	13.87%				
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Paket Alokasi Dana Penyaluran Bantuan Keuangan (Paket)					1	114,425,973,500	1	2,684,140,000	1	13,834,679,467				1	16,518,819,467	50.00%	14.44%				
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Paket Alokasi Dana Darurat dan Mendesak (Paket)					1	2,113,580,939	-	-	-	-				-	-	0.00%	0.00%				
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Alokasi Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota (Paket)					1	2,582,540,470	1	-	1	-				1	-	50.00%	0.00%				
																Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		48.71%	14.01%				
																Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH							900,435,000									63,633,200		7.07%				
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik (%)					100	900,435,000	100		100					50	63,633,200	50.00%	7.07%				
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Buku Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa (Buku)					2	56,650,000	1	-	-	1,400,000				1	1,400,000	50.00%	2.47%				
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Aset Pemda (Aset PEMPDA)					50		-		25					25		50.00%					
		Jumlah Titik Penjagaan (Titik Penjagaan)					2	436,020,000	2	-	2	37,428,600				1	37,428,600	50.00%	8.58%				
	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penilaian Aset Daerah (Dokumen)					2	34,800,000	-	-	-	1,265,300				-	1,265,300	0.00%	3.64%				
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pemindahtanganan Barang Milik Daerah (Dokumen)					1		-		1					1		100.00%					
		Jumlah Dokumen Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)					4	70,115,000	-		2					2		50.00%	0.00%				

BAB V

KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PEMBANGUNAN TAHUN 2020

A. Faktor-Faktor yang Terkait Kinerja

a) Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja.

Faktor pendorong keberhasilan kinerja antara lain :

1. Terbangunnya kerjasama antar Pimpinan dan Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
2. Terjalannya Koordinasi antar SKPD.
3. Tersedianya anggaran yang memadai.

b) Faktor penghambat Keberhasilan Kinerja

1. Masih terdapat aparatur yang belum memahami tugas pokok dan fungsinya.
2. Sumber daya manusia belum merata disetiap bagian.
3. Adanya beberapa kegiatan yang tidak terlaksana diakibatkan Recofussing Anggaran untuk COVID 19, sehingga ada beberapa kegiatan yang anggarannya dihapus.

c) Tindak lanjut yang diperlukan dalam renja SKPD tahun berikutnya.

1. Memilih kegiatan yang lebih terarah pada pencapaian RPJMD.
2. Menfokuskan kegiatan yang mendukung peningkatan kapasitas dan pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

d) Rekomendasi bagi arahan RKPD tahun selanjutnya

Menfokuskan pelaksanaan program-program yang mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Realisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

- Belanja Operasi, terealisasi sebesar 16,96%
- Belanja Modal, terealisasi sebesar 47,15%
- Belanja Tidak Terduga, terealisasi sebesar 0%
- Belanja Transfer, terealisasi sebesar 11,82%.

B. Saran-Saran

Berdasarkan tingkat realisasi penyerapan anggaran belanja pada Tahun anggaran 2021 ini maka disarankan kepada masing-masing PPTK sebagai berikut :

- Pengajuan Rencana Kegiatan dan Anggarannya agar tetap mengacu pada Renstra dan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang telah disusun dan ditetapkan sebelumnya.
- Percepatan pelaksanaan kegiatan pada masing-masing bagian lebih ditingkatkan.

Demikian Laporan Pengendalian dan Evaluasi Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2021 ini.

Watansoppeng, Juli 2021

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. SOPPENG**

Drs. H. I IPA. M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19680102 199603 1 005



